

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan
Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi**
(Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di
Terminal Rajabasa Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan
memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ALIYUDIN

1321030136

Program Studi : Mu'amalah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Gubenur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan
Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi**
(Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di
Terminal Rajabasa Lampung)

Dosen Pembimbing I : H. A. Khumedi ja'far, S.Ag.,M.H

Dosen Pembimbing II : Badruzzaman,S.Ag.,M.H.I

Proposal

Diajukan Sebagai Syarat untuk Melakukan Penelitian dan
memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ALIYUDIN

1321030136

Program Studi : Mu'amalah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Oleh

ALIYUDIN

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, sebab tanpa transportasi manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Umum Penumpang Antar Profinsi Kelas Ekonomi jarak Bandar Lampung Pringsewu tarif yang berlaku yaitu Rp. 6000 – Rp. 7000, akan tetapi pihak penyedia jasa bus membebankan tarif di atas ketentuan tersebut dengan tambahan sekitar Rp.10000 – Rp.25000 dari tarif normal yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No.06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu, dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*failed risearch*), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung - Pringsewu, yang meliputi kondektur, sopir, penumpang, dan Dinas Perhubungan Profinsi Lampung. Dengan teknik sampling yaitu 20% dari jumlah populasi. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap *editing*, *systematizing* kemudian data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif dengan kerangka berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubernur No.06 Tahun 2016 tidak sepenuhnya dilaksanakan, bahkan jauh dari hal tersebut masih ada kondektur atau penyedia jasa bus yang belum mengetahui peraturan tersebut. Penyedia jasa transportasi cenderung memberikan tarif seenaknya, jauh lebih tinggi Rp. 10000 – Rp. 25000 dari tarif normal. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam akad *Ijarah*, dimana terjadi kecurangan, pemaksaan dan ketidakrelaan kedua belah pihak, serta ketidakjujuran dari penyedia jasa bus dalam transaksi tersebut sehingga menjadikan akad tersebut tidak sah. Pemilik bus juga melanggar peraturan daerah yang dalam pandangan hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran dengan ketidaktaatan terhadap pemimpin.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro, Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016
tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus
Kelas Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek
Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa
Lampung)
Nama : ALIYUDIN
NPM : 1321030136
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.,
NIP. 19720826 200312 1002

Badruzzaman, S.Ag., M.Hi.,
NIP. 19680624 1199703 0003

Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.,
NIP. 19720826 200312 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi (Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung)”, Oleh: **ALIYUDIN NPM: 1321030136, Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin 20 November 2017**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, SHI., M.E.I

Penguji I : Nur Nazli, S.Ag, SH., M.Ag

Penguji II : H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.



**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Aliyudin, S.Ag., M.Ag
NPM: 1321030136**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹ (Q.S. An-Nisa ; 59)

¹ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 20015), h.84.

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu terima kasih atas doa tulus dan kasih sayang serta dukungan yang tak terhingga, serta kerja keras demi keberhasilan anak-anak nya, agar kelak kami menjadi orang yang berguna di masa depan.
2. Saudara-saudaraku terkasih, MbK Khusnul, MbK Nurul, serta saudara Kembarku Usmanudin, dan adikku Qonita Farhanah, yang selalu memberikan dorongan motivasi serta semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Muamalah A angkatan 2013
4. Sahabat-sahabat Ikhwafileh di UKMF Gemais dan UKM BAPINDA yang semoga dimulyakan Allah, terima kasih atas semua dukungan dan Doa Antum wa Antuna semoga Allah Membalas dengan Kebaikan Yang berlipat dan semoga Allah Kukuhkan ukhuwah kita hingga ke Jannah-Nya.
5. Sahabat-sahabat lingkaran ukhuwah akh Ajo, Akh Angga, Akh Edi, Akh Amar, Akh Riandy, Akh Rahmad, Akh Mahdika, Akh Khoiri serta guru sekaligus ustadz yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa Ust. Jevri Husanda, semoga Allah berikan selalu rahmat serta hidayah-Nya.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, pada tanggal 27 November 1995, sebagai anak keempat dari lima bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Ahmadi dan Ibu Suisni.

Pendidikan sekolah dasar ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Wargomulyo, diselesaikan pada tahun 2007, SMP N 3 Pardasuka, lulus pada tahun 2010, MA Nurul Iman jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, lulus tahun 2013, melanjutkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lulus tahun 2017. Penulis mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menempuh pendidikan penulis bergabung beberapa organisasi intra kampus, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Himpunan Mahasiswa syariah (UKM-F HAMAS), yang saat ini berganti nama menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Generasi Emas Mahasiswa Syariah (UKM-F GEMAIS), menjabat sebagai Anggota Bidang Kaderisasi periode 2014-2015, Kepala Bidang Kaderisasi periode 2015-2016, Ketua Umum Periode 2016-2017, Ketua Dewan Pembina Fakultas periode 2017-2018.

Penulis juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) sebagai anggota Bidang Kerohanian Islam periode 2017-2018, Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan (UKM BAPINDA) sebagai Kepala Divisi Kaderisasi, dan Staff Divisi Kaderisasi periode 2017-2018. Organisasi ekstra kampus yaitu FKMH dan simpatisan KAMMI UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah AWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dibidang Hukum Islam pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, pembawa risalah agama Islam yang lurus, penyempurna agama Ibrahim, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan yang penuh kemaksiatan dan kezaliman menuju zaman yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
2. H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. H. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Badruzaman Sidik, S.Ag., M.Hi., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

memberikan banyak ilmu dan masukan dalam membimbing penulisan skripsi ini.

4. Kasatpel Terminal Rajabasa Bandar Lampung Ibu Mustikawati, S.IP., yang telah membantu memberikan data yang lapangan yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai, staf Dinas Perhubungan Profinsi Lampung yang bertugas di Terminal Rajabasa Lampung yang telah ikut membantu dan mengarahkan dalam penelitian lapangan.
6. Bapak dan Ibu dosen serta para staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menimba Ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT. Agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penulis,

Aliyudin

NPM. 1321030136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I

BAB IV ANALISIS DATA

A.	
Pelaksanaan Peraturan Gubernur No 06 Tahun 2016 tentang	
Penetapan tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung	
– Pringsewu	64
B.	P
andangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan	
Tarif Angkutan Umum Bus Ekonomi Trayek Bandar	
Lampung- Pringsewu	67

BAB V PENUTUP

A.	Kesim
pulan.....	75
B.	Saran
.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa.....	53
Tabel 2 Fasilitas Utama Terminal Rajabasa Bandar Lampung.....	54
Tabel 3 Fasilitas Penunjang Terminal Rajabasa Bandar Lampung	55
Tabel 4 Struktur Sementara Terminal Rajabasa Lampung	57
Tabel 5 Susunan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Terminal Rajabasa Lampung.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya uraian atas penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi Studi Pada Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu di Terminal Rajabasa Lampung. Untuk itu perlu penulis uraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut.

1. Analisis didalam kamus besar bahasa indonesia yaitu peneyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dsb).²
2. Hukum Islam adalah kumpulan peraturan dalam ajaran islam yang menyangkut ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.³

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1 Cetakan Ke-VI*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum Islam adalah ketetapan hukum yang ditemukan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad SAW yang kini dapat kita baca dalam kitab-kitab hadis.⁴

Prof. Dr. T.M. Hasbi Asshiediqy dalam kitabnya *Fiqh Muamalah* mengartikan hukum Islam yaitu segala yang dikeluarkan yang (ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan amaliah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan masyarakat sesama lainnya dan membatasi tindakan mereka.⁵

3. Peraturan gubernur adalah Peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.⁶
 4. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan).⁷
 5. Tarif diartikan harga satuan jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk.⁸
 6. Angkutan umum merupakan moda transportasi darat untuk umum.⁹
- Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h.25.

⁵ Hasbi Assiediqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.31.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2013), H.178.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1457.

⁸ *Ibid*, h.1405.

⁹ *Ibid*, h. 69.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 yang mengatur tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu, yang memuat tentang aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah, tarif angkutan umum bus kelas ekonomi di seluruh Lampung. Serta analisis hukum Islam tentang pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu.

B. Alasan Memilih judul

1. Alasan objektif, melihat semakin sedikitnya masyarakat menggunakan transportasi umum dikarenakan mahal dan tidak sesuainya tarif angkutan umum. Ditengah permasalahan polusi udara, kemacetan, konsumsi bahan bakar yang besar maka dibutuhkan moda transportasi umum yang baik, nyaman, serta terjangkau bagi seluruh masyarakat guna mobilisasi melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan di atas serta menjadi masukan dan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait dengan angkutan umum sehingga perlu pembahasan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kegiatan muamalah tersebut. Penelitian terdahulu tentang tarif yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Tarif Angkot Di Kota Surabaya”.

2. Alasan subjektif, ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 juga mengatur tentang tarif angkutan umum yaitu terdapat dalam pasal 42, yang berbunyi: *“Dalam menetapkan struktur dan golongan tarif pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan umum, pemerintah menetapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas”*.¹⁰

Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 tentang Pengaturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam dan Luar Provinsi Dengan Bus Ekonomi provinsi Lampung disebutkan bahwa penetapan tarif

¹⁰ Undang- Undang Transportasi, h. 185.

angkutan diukur berdasarkan jarak dengan besarnya tarif dasar angkutan penumpang adalah sebesar Rp. 171,- (sertatus tujuh puluh satu rupiah) per penumpang per kilometer.¹¹

Namun pada praktik di lapangan terdapat ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang dibebankan bus kepada penumpang yang jika diukur perkilometer, maka jarak antara Pringsewu - Bandar Lampung adalah dengan tarif Rp.6609.3.¹² Namun yang terjadi dilapangan tarif ditetapkan berbeda-beda, pelajar, mahasiswa, pegawai negeri Rp.5000-Rp.10.000 penumpang umum Rp.15000- Rp25000, yang terlampaui besar bila dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan. Kondektur bus juga menyamakan tarif terhadap penumpang jarak dekat dengan jarak yang jauh, atau dalam istilah umumnya jauh dekat tarifnya sama.

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya (ada atauran halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹³

¹¹ Pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 *Tentang Peraturan Tarif Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Profinsi Bus Umum Kelas Ekonomi Di Profinsi Lampung*

¹² Tarif Jarak = Tarif Dasar X Jarak (KM) + Jasa Raharja (Rp.60) Berdasarkan Pergub Nomor 06 Tahun 2016

¹³ Imam Jalaluddin, Abdurrohman As-Suyuti, *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, Cetakan Kedua, Muhaqqiq : Markas Kajian Dan Pembahasan Di Maktabah Nazzar Al-Baz (Riyadh:Maktabah Nazzar Al-Baz,1997).

*“Pada dasarnya, segala bentuk muāmalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengaharamkannya”.*¹⁴

Seperti terdapat dalam firman Allah STW, An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْرًا مِّنْ أَمْرٍ ءَوَّلَكُمْ بِيَوْمِكُمْ ءَلَّا يَـُٔوْا بِأَن تَكُونُوا مِمَّنْ يَـُٔوْنَ حِزْبَ ءَنفُسِهِمْ ءَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁵

Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa Allah berfirman, “Kecuali dengan perdagangan yang suka-sama suka diantara kamu”. Maksudnya janganlah kamu melakukan paraktik paraktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

Dalam hal ini, yang penyusun teliti terkait dengan kebijakan penetapan tarif angkutan umum pada trayek Pringsewu - Bandar Lampung Studi Pada Terminal Raja Basa Lampung. Penelitian ini berfokus pada penetapan harga yang diberikan kepada penumpang bus yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

¹⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke III, 2003), h. 177.

¹⁵ Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2005) h.83.

¹⁶ Muhamad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 693.

Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penetapan tarif angkutan tersebut

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum oleh bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum pada bus ekonomi trayek Bandar Lampung - Pringsewu.
 - b. Untuk Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No.06 tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum bus ekonomi trayek Bandar Lampung - Pringsewu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya Muamalah.

- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan Provinsi Lampung dan para penyedia jasa angkutan umum guna meningkatkan mutu pelayanan transportasi umum yang lebih baik dan tarif terjangkau bagi masyarakat umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan¹⁷ dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Adapun objek penelitian tersebut adalah angkutan umum yaitu Bus Kelas Ekonomi Trayek Bandar Lampung - Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini di diskripsikan tentang pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 tentang tarif angkutan umum pada bus kelas ekonomi dan analisis

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.XIV, 2015), h.. 46.

hukum Islam Tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif angkutan umum yang berbeda dengan ketetapan pemerintah.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari sopir, kondrktur, penumpang, dan penyedia jasa bus.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al- Qur'an, Hadis Shahih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan penetapan tarif angkutan umum yaitu peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 tentang tarif angkutan umum bus kelas ekonomi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, sebagai materi pembahasan utama yaitu buku Fikih Muamalah karya Rahmad Syafi'i, Hendi Suhendi, Haroen Nasron, buku Fiqih Ekonomi Syariah karya Dr. Rozalinda, Yusuf Qardawi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Karim seperti jurnal, koran, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan

permasalahan ini. Sedang bahan hukum tersier yaitu kamus Hukum Islam, Kamus Fiqih serta Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek penelitian.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak penyedia jasa angkutan umum bus ekonomi trayek Pringsewu – Bandar Lampung di Terminal Rajabasa Bandar Lampung yaitu sopir, kondektur, penumpang. Yakni 5 bis ekonomi dengan 5 kondektur, penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 3 hari, jika dalam 1 hari ada seratus penumpang dalam 1 bis maka ada 1500 penumpang dalam tiga hari, maka populasi berjumlah 1500 penumpang dan 25 orang kondektur bus.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Berdasarkan buku Susiadi yang menyebutkan apabila subjeknya dari 100 atau lebih baik di ambil semua. Jika objek lebih besar dapat di ambil antara 10-15% atau 20-25%.¹⁹ Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel wawancara 10% yaitu 3 orang kondektur bus, 150 orang penumpang bus kelas ekonomi trayek pringsewu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),h. 95.

¹⁹ *Ibid*, h.95.

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden.²⁰ Melalui percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penetapan tarif angkutan umum yaitu kepada sopir, kondektur, penyedia jasa layanan bus.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan system *Ujrah* terhadap penetapan tarif angkutan umum dilapangan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²¹ Tujuannya yaitu untuk

²⁰ *Ibid.*, . h.70-97.

²¹ *Ibid*, h. 106-115.

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik pembulatan berat timbangan yang menyebabkan tarif berlipat tersebut, kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam.

Pola fikir yang digunakan adalah Deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, kemudian di kembangkan menjadi hipotesis.²² Dari pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014), h. 89.

BAB II

SISTEM PENGUPAHAN DAN PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Upah-mengupah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah-mengupah

Upah atau yang disebut dengan *Al-Ijarah*. berasal dari kata *al- ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al- 'iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah.²³ Dalam arti luas *Ijarah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.

Ada beberapa definisi *Ijarah* yang dikemukakan oleh para ahli fiqh.

a. Menurut Ulama Syafiiyah *Ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للتبديل والإباحة بعوض معلوم

“Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehan nya”

b. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah:

عقد على المنافع بعوض

“Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”²⁴

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

²⁴ *Ibid*, h. 113.

C. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة معلومة بعوض

“*Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.²⁵

- d. Menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.²⁶
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi *ijarah* adalah Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁷
- f. Menurut Ahsin W. Alhafidz, M.A dalam buku Kamus Fiqh menyebutkan *ijarah* adalah akad pemindahan hak-hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁸

Berdasarkan pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Kalau diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dan para ahli di

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 12

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid XIII, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. VII, 1987), h. 15.

²⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 115.

²⁸ Ahsan W Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 87.

atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ijarah antara lain²⁹:

- a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan Kabul.
- b) Adanya imbalan tertentu.
- c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2. Dasar Hukum Upah-Mengupah

Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, As-sunnah, dan Ijma.

a. Landasan al-Qur'an

Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

²⁹ Herianto, *Ijarah dalam Islam*, (On-line), tersedia di:

<https://heriantodjavawordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>, (23 Januari 2017)

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990) h. 194-196

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang kuat lagi dapat dipercaya”.³¹

Ayat di atas menerangkan bahwa *Ijarah* telah disyaratkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Al-Quran suarat Al-baqarah ayat 233 disebutkan:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “..dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Dengan ketentuan memberi upah sepantasnya kepada mereka,

Dua ayat di atas menyatakan bahwa transaksi upah-mengupah tidak terlepas dari memberikan upah sepantasnya dan bersikap adil dalam bertransaksi sebagaimana firman Allah SWT:

³¹Al-Qur'an Departemen Agama, RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro.2005) h. 310.

³² Al-Quran dan Terjemahannya RI, *Op.Cit.* h. 37.

وَيَقْوِمُوا أَوْفُوا أَلْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan syu’aib berkata: `hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumidengan membuat kerusakan” (QS. Hud : 85)³³

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa, ayat di atas merupakan perintah berlaku adil. Pada ayat sebelumnya Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya berlakulah adil terhadap Allah SWT dengan mengesakan-Nya, dan dilanjutkan pada ayat ini, yaitu perintah berlaku adil kepada manusia. Lanjut menurut beliau perlunya menyempurnakan timbangan, dengan keuntungan dari perniagaan yang telah diperoleh sudah cukup baginya, daripada berbuat kecurangan.³⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.³⁵

a. Landasan As-Sunnah

Disyaratkan agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan secara jelas dan di beritahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

³³ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 231.

³⁴ Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol.V* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 713-714.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ

اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَسِمَ لَهُ أَجْرَتُهُ³⁶

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya." (Hr. Al Baihaqi, dalam *Suan Al Qubra* juz 2 nomor hadist 160, *Jami' Musnad* Abu Hanifah Juz 2, nomor hadist 44,)³⁷

Disyariatkan pula agar menyegerakan upah kepada pekerja sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW yaitu dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم: غَطُّوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ³⁸

Artinya: Ibnu Umar ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya." (Hadis Riwayat Ibnu Majah, nomor hadist 2443, At Thabrani, juz 1 nomor hadist 20,).³⁹

Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah kepada pekerja atau buruh, yaitu hendaknya memberikan upah kepadanya sebelum keringatnya mengering atau dengan kata lain, harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai. Dan hendaknya memberitahukan kepadanya upah

³⁶ Muhamad Bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan'ani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1988), h. 156.

³⁷ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan Harun Zen dan Zaenal Mutaqin (Bandung: JABAL, 2015) h. 230.

³⁸ Muhamad Bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan'ani, *Op. Cit.*, h. 157.

³⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.cit.*, h. 230.

yang akan diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya. Segera membayar upah pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis diatas, dan menanggungkannya hokumnya tidak boleh. demikian pula memberitahukan upah yang akan diterimnya, wajib pula hukumnya.⁴⁰

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi SAW di atas, menjelaskan bahwa adanya kebolehan akad *ijarah* dengan objek transaksi tenaga seseorang, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa harta tetapi tidak mempunyai waktu. Dan disisi lain ada orang yang tidak memiliki beberapa harta tetapi mempunyai waktu. Dengan adanya *ijarah* dengan objek transaksinya tenaga orang maka orang yang mempunyain harta bisa meminta bantuan orang yang tidak mempunyai harta dengan imbalan diberikannya upah.

b. Landasan Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *Ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah Kesepakatan (Ijma') ini.⁴¹ Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak di anggap.⁴² Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijarah* (Upah-mengupah) yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijarah*.

⁴⁰ Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits (Hadis-Hadis Pilihan Berikt Penjelasannya)*, Terjemahan Moch Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru, 1993, Cet. I) h. 151-152.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 117.

⁴² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 18.

Maka berdasarkan nash al-Quran, sunnah (hadits), dan Ijma' tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijarah* atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

3. Rukun dan Syarat Upah-mengupah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu, pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴³

Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja. Selain ijab dan qabul, menurut Hanafi adalah syarat. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *Ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *Ujrah* (Imbalan/Upah), Manfaat, *sighat* (Ijab dan qabul).⁴⁴

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad meliputi *mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* sebagai orang yang menerima upah dan yang

⁴³ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2010) h.95.

⁴⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 231.

menyewakan, *Musta'jir* sebagai orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.⁴⁵

Syarat terjadinya akad (*al-inqad*) dari orang yang berakad. Menurut Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak di syaratkan harus baligh dengan ketentuan diizinkan walinya.⁴⁶ Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. mensyaratkan baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan. Dinyatakan tidak sah.⁴⁷ Dengan demikian syarat terjadinya akad yaitu, baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta)⁴⁸ dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad.⁴⁹ Dalam hal kerelaan kedua belah pihak, perintah dari nash al-Quran sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta-kamu yang berputar dikalangan kamu dengan cara yang bathil. Kecuali dengan jalan dagang yang ada saling rela di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh diri kamu karena sesungguhnya Allah Maha belas kasih kepadamu. Dan, barang siapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.* h. 170.

⁴⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 125.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h.19.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 118.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h.19.

kelak akan Kami masukkan dia kedalam api neraka.” (An-Nisa: 29-30)⁵⁰

Ayat ini memberikan syarat boleh dilakukan transaksi muamalah jika, transaksi tersebut saling rela kedua belah pihak, dan tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain. syarat kedua dari kata janganlah membunuh diri-diri kamu, menurut ahli-ahli tafsir pengertian yang sesuai dengan proporsinya yaitu, arti pertama, satu sama lain tidak boleh saling membunuh, dan arti kedua, tidak boleh membunuh diri sendiri dengan tangan sendiri. Dengan demikian, ayat ini memberikan pengertian bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*).⁵¹

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan “*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu*” dengan “jangan melakukan usaha-usaha yang haram dalam mendapatkan harta, akan tetapi ambilah perniagaan yang disyariatkan yang berpijak kepada kerelaan kedua belah pihak”.⁵² Imam As-Syafi’i berhujjah pada ayat diatas bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan penerimaan, karena itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁵³

b. *Shighat* (akad)

⁵⁰ Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.83.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 200.

⁵² Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)*, Terjemah Arif Rahman Hakim, Et. Al., (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2016), h. 357.

⁵³ *Ibid*

Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.⁵⁴

Dalam hukum perikatan Islam, Ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁵ Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁵⁶ Syarat-syarat Ijab qabul pada *Ijarah* yaitu, menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan, dibuat sebelum pekerjaan itu dilakukan dan tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain dan terjadi kesepakatan bersama.⁵⁷

c. *Ujrah* (upah)

Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Syarat-syaratnya pun sama seperti jual beli, harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa/upah (*Ijarah*).
Yaitu,

- 1) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci. Akad *ijarah* tidak sah bila upah (bayarannya)nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak, atau *khamar*. Tidak sah pula benda jika upahnya benda terkena najis dan tidak mungkin disucikan.

⁵⁴ *Ibid*, h. 116.

⁵⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h. 63.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*h. 117

⁵⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 189.

- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak sah dijadikan upah. Karena dianggap tidak berharga. Seperti alat-alat permainan yang tidak bermanfaat.
- 3) Upah harus dapat diserahkan dengan ketentuan upah berada dibawah kuasa orang yang berakad.
- 4) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi sejak awal. Dalam artian tidak mengandung *ghoror*.⁵⁸ Seperti upah menggiling sejumlah gandum dengan sebagian dari tepung yang dihasilkan, seperempat atau seperlima, karena belum diketahui seberapa banyak tepung yang dihasilkan.

4. Berakhirnya atau Rusaknya Upah-Mengupah

Ijarah (upah-mengupah) berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Menurut *Hanafiyah*, *ijarah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ijarah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* merupakan *Milk Al-Manfaah* (kepemilikan manfaat), sehingga dapat diwariskan. Inillah kiranya pendapat yang dapat diterima dan banyak membawa masalah bagi semua pihak.⁵⁹
- b. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya

⁵⁸ Musthafa Dib Al-Mugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah diterjemahkan dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah*, Terjemahan Fakhri Ghafur (Damaskus: Darul Musthafa, 2009) h.162.

⁵⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Sayriah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016),h. 140.

berhenti.⁶⁰ Atau terjadinya cacat padad saat barang sewaan yang terjadi di tangan penyewa.⁶¹

- c. Hilangnya manfaat atau tujuan dari yang diinginkan *ijarah* tersebut, manfaat yang telah *diharapkan* telah terpenuhi, atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan.⁶² Seperti seorang dokter yang disewa jasanya untuk mengobati orang sakit, namun pasiaen tersebut telah sembuh maka berakhirlah akad *ijarah* tersebut.
- d. Akad *ijarah* berakhir dengan *Iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* adalah akad yang *mu'awadah*. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan *iqalah*, seperti akad jual beli.⁶³
- e. Apabila akad *ijarah* telah berakhir waktunya, maka berakhirilah akad *ijarah* tersebut. Penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh, seperti semula.

B. Angkutan Umum

1. Pengertian angkutan umum

Pengertian angkutan bersal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim. Mengangkut berarti

⁶⁰ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),h. 486.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 122.

⁶² Shaleh Al Fauzan, *Op.Cit.*, h.486.

⁶³ Rozalinda, *Op Cit.*, h. 140.

mengangkat dan membawa, memuat, membawa atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan barang atau orang, pemuatan barang dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut.⁶⁴

Bila dirumuskan dalam suatu kalimat yang dimaksud dengan angkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat atau tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan penumpang dan/ atau barang dari alat angkut ketempat yang telah ditetapkan.⁶⁵

Pengertian angkutan menurut Undang-Undang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.⁶⁶

Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/ barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan,⁶⁷ yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa angkutan terdapat 5 (Lima) unsur-unsur pokok dalam angkutan umum:

- a. Manusia yang membutuhkan pengangkutan
- b. Barang yang dibutuhkan
- c. Kendaraan sebagai alat angkut
- d. Jalan sebagai prasarana angkutan, dan

⁶⁴ H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

⁶⁵ *Ibid*, h. 6.

⁶⁶ *Undang-Undang No 14 Th. 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Jaya Prasada, 1992), h.2.

⁶⁷ *Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

e. Organisasi sebagai pengelola angkutan.

2. Jenis- jenis angkutan umum

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai pengangkut, kecuali pengangkutan laut. Pengangkut adalah pihak yang mengaitkan diri unruk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

Berdasarkan statusnya sebagai badan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, pengangkut dapat dikelompokan dalam empat jenis yaitu:

a. Perusahaan pengangkutan kereta api

Menurut ketentuan UU no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, pengangkut yaitu badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretapihan umum, wajib memiliki izin usaha dan izin oprasi dari pemerintah.

Badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang yang sudah ada hingga kini adalah badan usaha milik negara yaitu PT Kreta Api Indonesia Persero.

Pengangkutan dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta. Kereta adalah gerbong khusus kereta api yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Pengangkutan kereta dengan menggunakan gerbong wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal, antara lain, tempat duduk, penerangan, kipas angin, pelayanan penumpang dan toilet darurat (Pasal 130 Tahun 2003 Undang-Undang No 23 Tahun 2007). Contohnya Kereta Api Listrik (KRL), Kereta Apai Diesel (KRD), Kereta Argo Bromo, Kereta Apai Sriwijaya.

b. Pengangkut pada pengangkutan jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Kendaraan umum adalah sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang dengan dipingut bayaran atau upah (Pasal 1 Angka 7,8, dan 9 Undang-Undang No 2 Tahun 2009). Kendaraan umum seperti bus, angkot, ojek, taksi.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri⁶⁸ dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota ke kota yang lain.

⁶⁸ Undang-Undang No 14 Th. 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Jaya Prasada, 1992), h.

- b. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan.
- c. Angkutan yang merupakan pemindahan dari satu kota ke kota yang lain.
- d. Angkutan lalu-lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.
- c. Pengangkut pada pengangkutan perairan

Pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang /barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan di perairan terdiri atas pengangkutan laut, pengangkutan sungai, dan danau, serta pengangkutan penyebrangan (Pasal 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2008). Pengangkutan laut terdiri atas pengangkutan laut dalam negri, pengangkutan laut luar negri, pengangkutan laut khusus, dan pengangkutan laut pelayaran rakyat (Pasal 7 Undang-Undang No 17 tahun 2008. Pengangkutan di perairan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan yang khusus didirikan untuk pelayaran.

Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan keperdataan dari hukum laut karena apabila kita berbicara tentang hukum laut hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan hukum privatnya saja tetapi juga meliputi hal-hal termasuk lingkungan hukum publik dari hukum laut itu.⁶⁹

⁶⁹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h.460.

d. Pengangkut pada pengangkutan udara

Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kegiatan pengangkutan udara terdiri atas pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara bukan niaga. Pengangkutan niaga terdiri atas pengangkutan niaga dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan pengangkutan udara niaga dapat dilakukan dengan berjadwal dan tidak berjadwal oleh badan usaha pengangkutan udara niaga nasional dan atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo.

Angkutan udara mempunyai fungsi sebagai penyedia jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan, peningkatan armada atau pesawat udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa dan pengembangan jasa-jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi.

3. Kualitas kerja Angkutan Umum

Pelaksanaan sistem transportasi masyarakat harus dijalankan dengan kualitas hal ini karena peranan transportasi dalam kehidupan manusia sangat luas dan berfungsi strategis. Manfaat transportasi yang dirasakan oleh suatu kegiatan biasanya tidak bersifat tunggal, tapi multi manfaat, artinya manfaat ekonomi juga manfaat sosial. Untuk tercapainya transportasi berkualitas, maka jasa pelayanan diusahakan secara cepat,

aman, nyaman, frekuensi yang teratur, cukup, bertanggung jawab dan murah.⁷⁰

a. Cepat

Cepat dalam transportasi ditinjau dalam dua cara yaitu:

- 1). Waktu yang digunakan oleh kendaraan atau muatan (barang dan penumpang) selama perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2) Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan barang-barang atau penumpang yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan berikutnya, termasuk waktu selang untuk pemuatan, pembongkaran, pengisian bahan bakar, dan perbaikan kendaraan.

Beberapa aspek yang lebih relevan tentang transportasi manusia secara cepat yaitu:

- (a). Penumpang yang merasa kurang nyaman dengan waktu transit yang lama
- (b). Dalam perjalanan bisnis penghematan waktu berarti penghematan bisnis. Penghematan waktu (*time is money*)
- (c) Biaya perjalanan dapat diperkecil dengan pemanfaatan fasilitas transportasi secara intensif
- (d) Dalam beberapa hal transportasi dengan kecepatan tinggi mempunyai pengaruh yang kurang menyenangkan secara fisik yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan ketakutan penumpang.

⁷⁰ Raharjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 17.

b. Aman atau keselamatan (*safety*)

Peneyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi rambu-rambu an lampu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalulintas yang merugikan penumpang dan brang yang diangkut serta manusia dan benda lainnya. Untuk angkutan penumpangperlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan dan diberikan sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak memilikinya.

c. Cukup/ kapasitas (*capacity*)

Untuk angkuatan penumpang, jumlah angkutan harus dikaitkan pula pada permintaan maksimum pada suatu titik waktu. Dan jumlah penumpang dalam suatau kendaraan yang sesuai tidak melebihi kapasias yang diperuntukan.

d. Frekuensi

Jasa transportasi yang dilakukan secara sering berarti waktu menunggu adalah kurang, dan terdapat kemungkinan dialkukan perjalanan yang lebih luas dalam waktu yang terbatas.

e. Bertanggung jawab

Para pemakai jasa transportasi baik pemilik barang maupun penumpang mengharapkan pengangkutan yang amana atau diberikas kompensasi atas kerugian, baik kehilanagn ataupun kecelakaan yang diakibatkan daripadanya.

f. Murah

Kemampuan daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan penyedia jasa angkutan umum agar harga yang ditetapkan dapat dijangkau semua kalangan dan mencerminkan keadilan harga bagi semua pihak.

g. Nyaman

Kenyaman menjadi faktor mutlak yang musti ada dalam pelayanan umum agar dapat diminati, seperti penumpang tidak melebihi kapasitas tempat duduk yang ada, kebersihan, serta pelayanan yang baik saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

4. Angkutan Antar Kota

Merupakan pemindahan penumpang dari suatu kota ke kota lain. Pemindahan tersebut bisa pengangkutan antar kota antar provinsi atau pengangkutan antar kota dalam provinsi. Pengangkutan menggunakan moda transportasi berupa bus umum yang terikat dengan trayek.

5. Pelayanan Trayek Angkutan Umum

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

Jenis pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas⁷¹:

- a. Pengangkutan lintas batas negara
- b. Pengangkutan antar kota antar provinsi
- c. Pengangkutan antar kota dalam provinsi
- d. Pengangkutan perkotaan
- e. Pengangkutan perdesaan.

Sedangkan pada Pasal 143 diatur tentang kriteria pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor, umum dalam trayek harus:

- a. Memiliki rute tetap dan teratur
- b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan penumpang di terminal untuk pengangkutan antar kota dan lintas batas negara; dan
- c. Menaik dan menurunkan pada tempat yang ditentukan untuk pengangkutan perdesaan dan perkotaan.

6. Tarif Angkutan Umum

Ditinjau dari kepentingan perusahaan pengangkutan, tarif angkutan harus ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang bersangkutan dapat berusaha dengan menguntungkan. Di pihak lain masyarakat dalam hal ini konsumen atau pengguna jasa angkutan, tarif angkutan haruslah ditawarkan serendah mungkin agar dapat dijangkau semua kalangan.

⁷¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung: PT Aditiya Citra Bakti, 2013), h.58

Mengingat pentingnya masalah tarif, maka perananan pemerintah dalam pengaturan tarif bisanya besar pula. Pemerintah tidak membiarkan pemebentukan tarif melalui persaingan diantara perusahaan-perusahaan karena adanya kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tarif angkutan umum ditetapkan oleh pemerintah profinsi dengan menetapkan peraturan daerah bersama dengan Dinas perhubungan Profinsi Lampung, PT Jasa Raharja, DPD Organda Lampung, Kepolisian Daerah Lampung serta perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk secara bersama-sama merumuskan kebijakan penetapan tarif angkutan umum.

Pemerintah menetapkan tarif mengacu pada biaya oprasional kendaraan, yag meliputi⁷²:

a. Biaya tetap

1. Upah mengemudi

Upah pengemudi didapat dari sisa pendapatan setiap hari setelah dikurangi setoran, biaya pemakaian bahan bakar dan biaya retribusi.

2. Biaya administrasi

Biaya administrasi terdiri dari biaya PKB, KIR, ijin usaha, ijin trayek. Besarnya berbeda-beda untuk kendaraan.

3. Biaya PKB (pajak kendaraan bermotor)

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

⁷² Cristian Yosua Palilingan, et. al, *Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon dengan Metode Analisa Biyaya Oprasional Kendaraan*, Jurnal Sipil Statik, Vol 1, No.8, (Juli 2013), H. 589

4. Biaya KIR

Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kendaraan secara teknis dapat layak atau tidak beroperasi di jalan raya.

5. Biaya ijin usaha

Biaya yang digunakan untuk memperoleh ijin penggunaan kendaraan angkutan umum.

6. Biaya retribusi

Biaya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap kali angkutan umum memasuki terminal.

7. Keuntungan

Biaya ini adalah keuntungan bagi pemilik kendaraan. Biaya ini ditetapkan 10% pertahun dari harga kendaraan.

b. Biaya Variabel

Meliputi biaya bahan bakar seperti, biaya minyak pelumas seperti oli mesin, oli transmisi, oli gardan, minyak rem, gemuk/vet. Biaya pemakaian suku cadang, serta pemeliharaan seperti servis dan overhaul.

c. Biaya Kepemilikan Aset

d. Biaya depresiasi

Biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomis kendaraan yang bersamaan dengan bertambahnya waktu.

Tarif angkutan penumpang lebih sederhana persoalannya dibandingkan dengan tarif angkutan barang, sebagai berikut⁷³:

- a. Untuk penumpang disediakan kelas yang berbeda-beda seperti kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Penumpang yang mampu akan memilih kelas 1 yang memberikan kualitas jasa transportasi yang lebih baik oleh sebab itu tarif angkutannya lebih tinggi pula.
- b. Pada umumnya tarif angkutan bus ditetapkan semakin tinggi bila jarak yang ditempuh semakin jauh pula, akan tetapi tingkat kenaikannya semakin menurun. Dalam hal ini tarif angkutan bus dalam kota ditetapkan searagam, yaitu sama untuk semua jarak dan trayek. Untuk jarak jauh maupun jarak pendek, demikian untuk angkutan trayek yang berbeda dikenakan tarif angkutan yang sama.
- c. Dalam hal usia, penduduk umur dewasa biasanya dibebani tarif yang lebih mahal daripada kelompok anak-anak yang dianggap masih menjadi tanggungan orang tuanya.
- d. Urgensi perjalanan, perjalanan yang sifatnya khusus atau mendadak, tarifnya lebih tinggi dibandingkan perjalanan lainnya.

Regulasi tentang tarif angkutan umum di tuangkan dalam Peraturan gubernur yang ditetapkan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan

⁷³ Sakti Ajdi Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 86.

mempertimbangkan aspek yaitu, biaya oprasional kendaraan (BOK) serta daya beli masyarakat sehingga tercipta transportasi yang efisien dan efektif.

C. *Al Tas'ir Al Jabari*

1. Pengertian *Al Tas'ir Al Jabari*

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as saman* dan *as-sir*. “*As-Saman*” adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara “*As-si'r*” adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (dipasar).⁷⁴ Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as'-si'ir* bukan *as-saman* karena *as'-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.

Definisi *al tas'ir al jabari* menurut para ulama sebagai berikut:

a. Menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani :

“*Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimim kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu , dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.”⁷⁵

b. Menurut ulama Madzhab Hambali:

⁷⁴ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 380.

⁷⁵ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 380.

Mendefinisikan *al tas'ir al jabari* dengan uapaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.⁷⁶

c. Menurut Sayyid Sabiq:

Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula terhadap kezaliman pembeli.

d. Menurut Ibnu Taimiyah:

Mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, yaitu keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga *mitsli* (harga pasar). Hakikat *tas'ir* adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual dan tidak memberi kecuali dengan harga *mitsli* (dengan harga pasar).

2. Dasar hukum Al-Tas'ir Al Jabari

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ،

⁷⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intracama , 1997), h.1803

الْبَاسِطُ، الرِّزْقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁷⁷

Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, menceritakan kepada Qatadah, Tsabit dan Mumaidd dari Anas Ra ia berkata :” pada zaman Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata: ‘ya Rasulullah, harga-harga dipasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.’ Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim dalam soal harta dan nyawa.⁷⁸ (Sunan Tirmidzi, nomor hadist 1312, Sunan Abu Daud, hadist nomor hadist 3447, Sunan Ibnu Majah nomor hadist 2200, Musnad Ahmad juz 3 nomor hadist 286, Al Mu’jam As-Saghir At Tabrani juz 2 nomor hadist 7)

Berdasarkan hadis di atas Ulama fiqih menyatakan kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah tersebut adalah bukan tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tapi karena memang komoditas yang ada dipasar terbatas, maka wajar harag barang tersebut naik.

Menurut Yusuf Qardawi hadis diatas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku menurut alamiyah, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misal penjual menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kazaliman, namun harga naik karena banyaknya orang yang meminta barang terebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiyah terjadi di pasar, misalnya monopoli sehingga masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur tangan

⁷⁷ Abu Isa Muhamad Bin Isa Bin Saurah Attirmidzi, *Jami’ As Shahih Sunan At Tirmidzi Juz 3* Kitab Jual Beli (Beirut: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1990), h. 60-606.

⁷⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.cit.*,201.

membatasi harga komoditas di pasar tersebut jika harga yang berlaku dipasaran bersifat alamiyah, karena tindakan tersebut bersifat lalim bagi pedagang.

3. Pandangan fuqoha terhadap *tas'irul jabari*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan *al tas'ir al jabari* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. Seperti yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»⁷⁹

Artinya: Muhamad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, menceritakan pada kami Hammad bin Salamah, menceritakan pada Qatadah, Tsabit dan Mumaidd dari Anas Ra ia berkata :” pada zaman Rasulullah terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata: ‘ya Rasullulah, harga-harga dipasar melonjak tinggi, tolonglah tetapkan harga tersebut.’ Rasulullah SAW menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan memberi rezeki. Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku lalim dalam soal harta dan nyawa.⁸⁰ (*Sunan Tirmidzi*, nomor hadist 1312, *Sunan Abu Daud*, hadist nomor hadist 3447, *Sunan Ibnu Majah* nomor hadist 2200, *Musnad Ahmad* juz 3 nomor hadist 286, *Al Mu'jam As-Saghir* At Tabrani juz 2 nomor hadist 7).

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Ju'mhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, Seperti Ibnu Qudamah, Ulama Muta'akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabani

⁷⁹ Abu Isa Muhamad Bin Isa Bin Saurah Attirmidzi, *Jami' As Shahih Sunan At Tirmidzi* Juz 3 Kitab Jual Beli (Beirut: Dar Al Kutub Al Alamiyah, 1990), h. 60-606.

⁸⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.cit.*, 201.

mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*).⁸¹

Mereka mendasarkan ini pada Qs An-Nisa (4:29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمَٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ ۖ إِنۡلَاَ أَنْ تَكُونُوا بَحۡرَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ۖ وَلَا تَقۡتُلُوا ءَنفُسَكُمۡ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًۭا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸²

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat didalam Al-Qur'an dan hadis. Sebab *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk menjual beli harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuia dengan keterangan nash di atas, hal itu tidak boleh terjadi.⁸³

Ibn Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengtur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hambali ini, ada dua alasan tidak diperkeanankannya pemerintah menetapkan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah nenetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli

⁸¹ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 380

⁸² Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.83

⁸³ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 380

melibatkan hak milik seseorang, didalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.⁸⁴

Sayyid Sabiq juga mengatakan terlarang melakukan *tas'ir* berdasarkan ketentuan hadis riwayat Anas Bin Malik di atas. Menurutnya berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan haram hukumnya menetapkan *tas'ir* karena hal ini dikawatirkan mendatangkan kezaliman. Sementara manusia bebas melakukan transaksi terhadap hartanya.

Yahya bin Umar yang merupakan salah satu Fuqoha Mazhab Maliki berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan beliau berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muahamad SAW tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi hasil permintaan dan penawaran yang alami tanpa capur tangan manusia. Maka dalam hal ini pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.⁸⁵ Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

⁸⁴ Abdul Azhim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terj. A. Anshari Thayib, (Jakarta: Pt. Bina Ilmu, 1997, h. 111-112)

⁸⁵ Qusthoniah, *Tas'ir Al Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqih Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*, Jurnal Syariah, Keislaman, Dan Peradaban, Vol.2. No.2. (Oktober 2014), h. 94.

- 1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat diburuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudhorotan dan merusak mekanisme pasar.
- 2) Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengancam stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menaikkan kembali harganya sesuai yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolak hal tersebut pemerintah boleh menolaknya, pemerintah berhak mengusir pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikan oleh Umar Ibn Al- Khattab ketika seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar.⁸⁶

Pernyataan Yahya bin Umar diatas jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan pada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek masyarakat. Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk pada kaidah-kaidah. Diantara kaidah itu adalah pemerintah berhak melakukan intervensi jika terjadi sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.⁸⁷

Hal senada juga disampaikan oleh ulama kontemporer Yusuf Qardhawi, menurut beliau penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan

⁸⁶ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, h.287.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 288.

ada yang haram. *Tas'ir* ada yang dzalim, itu yang di haramkan, dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan menjual barang dengan harga yang tidak mereka ridhai, maka tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya kedilan sebagai mana yang diminta Allah.⁸⁸

Pendapat yang paling kuat, jumhur ulama yang mengharamkan *tas'ir* secara mutlak, baik itu *tas'ir* untuk melindungi kepentingan pembeli maupun *tas'ir* untuk melindungi kepentingan pedagang. Hal ini dikarenakan dalil-dalil yang mengharamkan *tas'ir* bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan *taqyid*. Yaitu pemberian sifat atau syarat atau batasan tertentu. Jadi, tidak ada dalil yang menerangkan *tas'ir* yang diharamkan hanyalah yang bersifat dzalim, sednagkan *tas'ir* yang bersifat adil dibolehkan.⁸⁹

Mayoritas ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* pemerintah boleh (bahkan Wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syariat Islam, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Meski demikian pemerintah dalam menetapkan harga harus berpegang pada syarat-syarat,⁹⁰ yaitu:

(1) Komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,

⁸⁸Yusuf Qardhawi, *Etika Norma Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani,1997) h.257.

⁸⁹Rozalinda, *Op.Cit.*, h.384.

⁹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.145.

- (2) Adanya kesewenang-wenangan dari pedagang dalam menentukan harga,
- (3) Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dan menunjukan pakar ekonomi untuk menganalisa keadaan pasar..
- (4) Pematokan harga berdasarkan keadilan semua pihak,
- (5) Adanya pengawasn dari pemerintah secara terus-menerus, dan
- (6) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

Ibnu taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana intervensi harga harus dilakukan⁹¹:

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari reguler *market price*, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervetion*) yang adil.
- b. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menuut konsumen, sedangkan pemerintah meminta harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini, maka price intervetion (intervensi harga) harus dilakukan musyaarah dari konsumen dan produsen yang difasilitasi oleh pemerintah. Setelah musyawarah dengan investigasi atas *demand*, *suplay*, biaya produksi, dan lainnya, pemerintah harus mendorong penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Selanjutnya pemerintah menentukan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal

⁹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edidsi Keempat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h.164-165

masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.

Menurut ulama fiqih, syarat-syarat *Al Tas'ir Al Jabari* adalah:

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa pedagang atau pemilik jasa melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi atau jasa dagangan mereka.
- c. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.
- d. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- e. Ada pengawasan berkesinambungan dari pihak penguasa dalam hal ini pemerintah terhadap pasar.

Berdasarkan uraian di atas dimana intervensi pemerintah diperlukan, mekanisme pasar, regulasi dan moral harus ada dalam satu kesatuan, satu paket pemikiran. Peran efektif dari negara dalam hal ini sebagai mitra, katalisator, dan fasilitator, sangat dibutuhkan guna mewujudkan visi Islam.

4. *Al Maqasid Al-Shariah*

Secara umum, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia seluruhnya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di

akhirat kelak.⁹² Dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat* yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.⁹³ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al anbiya' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Maslahat secara etimologi adalah akar kata tunggal dari *Al-Mashalih* sama artinya dengan *Al-Shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan.⁹⁴ Imam Al- Ghazali mendefinisikan mahslahat pada prinsipnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Al khawarizmi mendefinisikan masalahat yaitu memelihara maksud-maksud syara' dengan menolak kemafsadhatan dari manusia.⁹⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar tentang makna masalahat, yaitu bahwa yang dimaksud dengan masalahat ialah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azaz menarik manfaat dan menolak kemafsadatan.⁹⁶

⁹² H. Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet Ke-2, 1992) h. 65

⁹³ H. Muhhamad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet Ke-19, 2013) h.61

⁹⁴ Maimun, Ushul Fiqih II, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (Aura) , Cet Ke -4, 2016) h. 55

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *ibid*

Abu ishak Al Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang kemudian disepakati oleh ilmuan Islam lainnya. Kepentingan hidup yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut diatas merupakan tujuan utama yang harus dipenuhi dalam hukum Islam.

1) Pemeliharaan Agama

Agama merupakan tujuan utama hukum Islam, yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain. Agama Islam merupakan nikmat tertinggi dan sempurna dalam hidup manusia, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah: 3 ialah:

.....أَلْـيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:”Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak

akidahnya, ibadahnya dan akhlakunya. Atau yang akan mencampur adukan antara kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham aliran yang bathil.⁹⁷

Selain itu agama Islam dalam konteks bermasyarakat juga memberikan perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan mengamalkan praktik ibadahnya (Qs.2:256). Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah Taa'ala, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun adalah hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara sebagaimana yang dikehendaki-Nya(QS.31:13).⁹⁸ Dalam konteks ekonomi menjaga Agama adalah dengan melakukan aktifitas ekonomi sesuai dengan tuntunan agama (Syariat) menjauhkan dari hal-hal yang merusak agama yang menjdikan rusaknya akidah dan keimanan kepada Allah, diantara dengan menjahui praktik riba, tadlis, gharar, judi, dan lainnya.

2) Memelihara Jiwa

Tujuan pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam karena itu hukum Islam wajib menjaga hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan atau hal-hal yang dapat menciderai manusia yang dapat mengarah pada hilangnya jiwa seseorang, maka wajib hukumnya memelihara dan mempertahankan kehidupan manusia.

⁹⁷ H. Ismail Muhamad Syah, *Op.Cit.* h. 68

⁹⁸ H. Ismail Muhamad Syah, *Op.Cit.* h. 69

3) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dua hal yang membuatnya istimewa yaitu ialah Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk (Qs.95:4). Yang kedua ialah manusia dikaruniai akal (Qs. 13:4).

Akal sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalny manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalny manusia dapat menggunkan untuk mengembangkan ilmu pengatuan dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi tujuan akal. Penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia guna mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat, tidak untuk hal-hal yang merugikan umat manusia.

Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan manusia untuk memelihara akal agar dijauhkan dari kerusakan akal dan penyelewengan akal, seperti minum- minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, dan segala hal yang dapat merusak fungsi kerja akal.

4) Memelihara Keturunan

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dalam kelanjutan umat manusia dan dapat diteruskan, merupakan tujuan ke empat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah menjadi syarat untuk saling mewarisi (Qs. 4 :11), tentang wali nikah, aturan-aturan perkawinan,

dan larangan mendekati zina dan berzina. Dalam hukum kewarisan dan munakahat diciptakan untuk menciptakan kemaslahatan dalam memelihara darah dan keturunan.

5) Memelihara Harta

Harta merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dengan negara, misalnya penipuan (Qs 4:29), penggelapan (Qs 4:58), perampasan (Qs. 5:33), pencurian (Qs. 5:38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik, adil, serta dapat dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Oleh sebab itu diatur transaksi muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, perserikatan, utang-piutang, serta akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi Islam.

BAB III

Pelaksanaan Peraturan Gubernur No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Terminal Rajabasa Lampung

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Terminal Rajabasa Lampung adalah terminal induk Tipe A yang terletak di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung Indonesia, terminal induk berfungsi sebagai pusat atau induk dari terminal pembantu dengan tingkat pelayanan yang berjangkauan regional atau antar kota dan lokal atau dalam kota yang memiliki kapasitas angkut dan folu yang tinggi. Terminal ini merupakan salah satu terminal terbesar dan tersibuk di pulau Sumatra. Terminal ini dibangun pada tahun 1980 pada masa kepemimpinan Gubernur Lampung Ketiga R. Sutiyoso.⁹⁹

Terminal Rajabasa dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diresmikan oleh Bpk. Surharjono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan pada saat diresmikannya, Terminal Rajabasa masih termasuk wilayah administratif Lampung Selatan.

⁹⁹ <http://Lampung.Tribunnews.Com/2017/06/01/Terminal-Induk-Rajabasa-Dibangun-Gubernur-Sutiyoso>. Diakses hari Jum'at tanggal 01-06-2017 pukul 14:26.

Adapun sejarah kepemimpinan terminal Rajabasa yaitu:

Tabel 1. Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa

NO.	Tahun Kepemimpinan	Nama Kepala Terminal
1	1980 – 1993	Bpk. Nafsihi Tugiyono
2	1993 – 1994	Bpk. Sobri Martin
3	1994 – 2000	Bpk. Zainal Abidin
4	2000 – 2003	Bpk. Mega sumbahan
5	2003 – 2004	Bpk. Munzir Ali
6	2004 – 2005	Bpk. Putu Yuasa
7	2005 – 2006	Bpk. Zaini, S. Sos.
8	2006 – 2011	Bpk. Ruslan Roni, SE
9	2011 – 2017	Bpk. Anthony Makki
10	2017-Sekarang	Ibu Mustikawati, S.IP.

Sumber : Tata Usaha dan Kepegawaian Terminal Rajabasa

Terminal Rajabasa merupakan terminal tipe A yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Profinsi (AKAP), dan atau Lintas Batas Negara, Dalam Angkutan Antar Kota Profinsi (AKDP), Angkutan Kota, dan Angkutan Pedesaan. Terminal ini secara letak geografis tepatnya berada di utara kota Bandar Lampung, tepatnya di jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung, yang berseberangan dengan pertigaan kearah universitas lampung, dan dekat dengan Mall Lampung. Terminal Rajabsa

dibangun di atas tanah seluas ± 12 Ha. Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berada di sekitar kelurahan rajabasa, Kecamatan Rajabasa.

Adapun batas dari Terminal Rajabasa meliputi:

1. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.
2. Selatan berbatasan dengan Jalan Zainal Abidin PA.
3. Timur berbatasan dengan Universitas Lampung.
4. Barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa

Dalam penyelenggaraanya terminal Rajabasa memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan KepMenHub No 31 tahun 1995 tentang terminal dan Transportasi Jalan, yaitu:

Tabel 2. Fasilitas utama terminal Rajabasa Bandar Lampung

NO.	FASILITAS UTAMA	JUMLAH
1	Jalur Pemberangkatan Angkutan Umum	2
2	Jur Kedatangan Angkutan Umum	2
3	Jalur Tunggu Angkutan Umum	1
4	Ruang Tunggu Penumpang	1
5	Kantor Terminal	1
6	Tempat Istirahat Sementara Kendaraan Umum	1
7	Menara Pengawas	Tidak ada
8	Loket Penjualan Tiket	60
9	Rambu, Papan Informasi	5
10	Pelataran Parkir Kendaraan Pengantar dan Taksi	Tidak ada

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa

Tabel 3. Fasilitas penunjang Terminal Rajabasa Bandar Lampung

NO.	FASILITAS PENUNJANG	JUMLAH
1	Kamar Kecil/ Toilet	4
2	Masjid	1
3	Kios/ Kantin	Tidak ada
4	Puskesmas Pembantu	1
5	Ruang Informasi dan Pengaduan	1
6	Telepon Umum	Tidak ada
7	Taman	1

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa

Terminal Rajabasa juga Memiliki kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengguna terminal Rajabasa. Adapun instansi-instansi lain tersebut yaitu:

- a. Kepolisian (Poltabes Bandar Lampung)
- b. TNI (Koramil)
- c. Kelurahan Rajabasa
- d. Jasa Raharja
- e. Organda
- f. Media cetak dan Media Elektronik.

2. Visi-Misi Terminal Raja Basa Lampung

Pada dasarnya visi dan misi terminal rajabasa lampung, mengacu pada visi misi Dinas Perhubungan Profinsi Lampung yaitu:

Visi:

Terwujudnya jasa perhubungan yang berdaya saing, mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah.

Misi:

1. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
3. Memperluas jaringan pelayanan jasa perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

3. Struktur Organisasi Terminal Rajabasa Lampung

Mulai per tahun 2017 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengambil alih pengelolaan Terminal Rajabasa Lampung, yang terasukkedaa kategori tipe A. Kementerian perhubungan menjelaskan, acuan dasar pengambilan Terminal Rajabasa tipe A berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993.¹⁰⁰

Untuk saat ini stuktur organisasi, tugas, serta topoksi kerja strukrur yang baru masih dalam proses penyusunan di kementerian perhubungan. Setelah nanti dikeluarkannya surat keputusan barulah ada struktur resmi. Sementara ini tugasnya mengikuti yang terdahulu sampai ada refisi peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Bagan struktur susunan organisasi dan tata kerja UPT Terminal Rajabasa sebagai berikut:

Tabel. 5 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Rajabasa Lampung

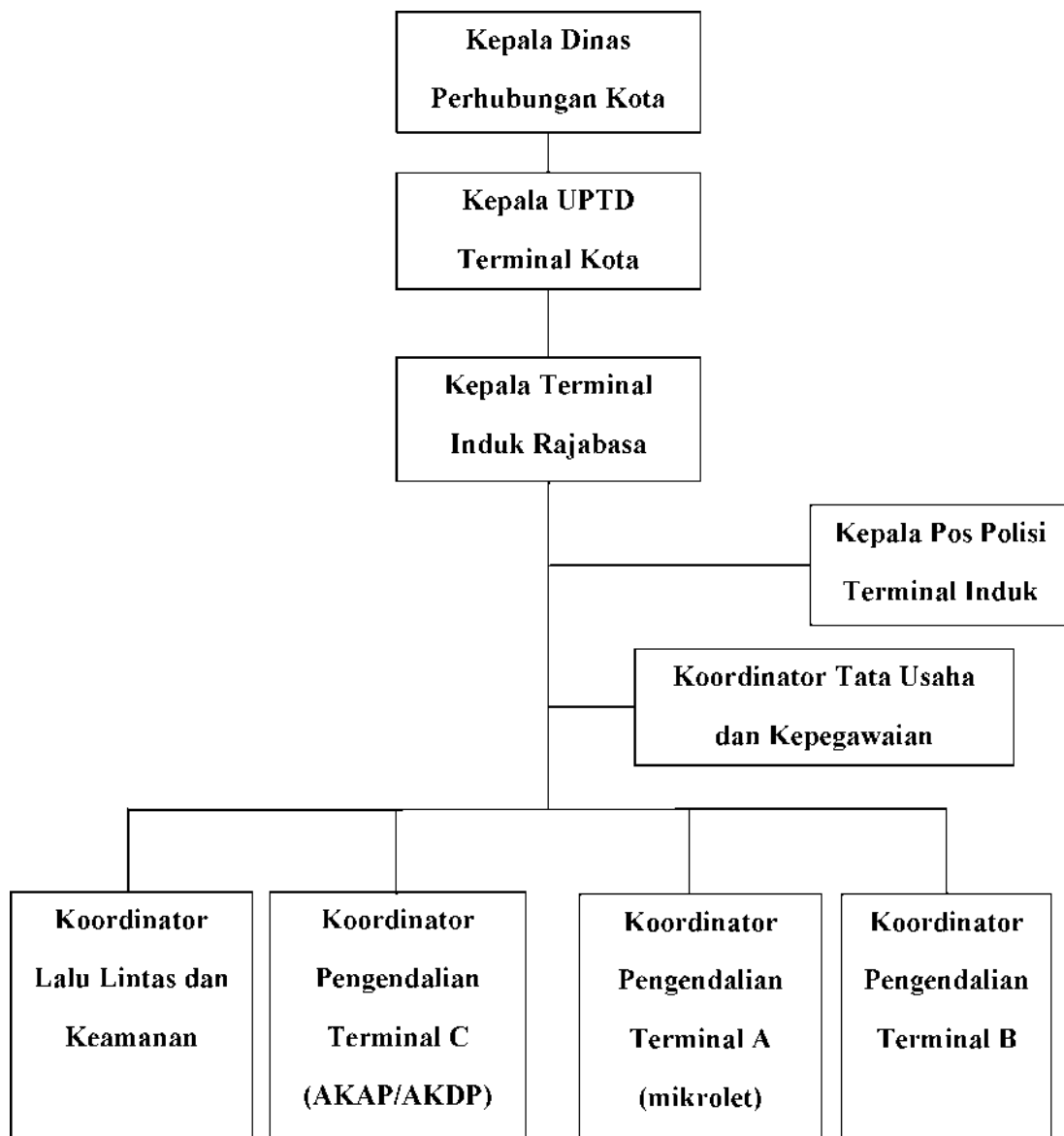
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

¹⁰⁰ 2017, *Kemenhub Resmi Ambil Terminal Rajabasa*, Cupas Tuntas.Co. <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-08/2017-kemenhub-ambil-alih-terminal-rajabasa/>. Diakses Tanggal 28 Sptemeber 2017 Pukul 12:59 Wib

¹⁰¹ Katrina Desi A, Pegawai Dinas Perhubungan Terminal Rajabasa Lampung, *Wawancara*. Tgl 28 September 2017 Di Terminal Rajabasa Lampung

Unit Pelaksana Teknis Terminal Rajabasa Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung



Sumber: Terminal Induk Rajabasa

4. Tugas Dan Fungsi Terminal Rajabasa Lampung

Fungsi utama dari terminal secara umum meliputi 3 unsur terkait yaitu, penumpang, pemerintah, dan oprator angkutan umum. Funs-fungsi tersebut ialah:

- a) Fungsi terminal bagi penumpang adalah mempermudah perpindahan dari satu moda ke moda lainnya atau dengan kata lain untuk mempercepat arus penumpang menuju daerah tujuan dengan memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan, tersedianya fasilitas terminal dan informasi serta fasilitas parkir kendaraan pribadi.
- b) Fungsi terminal bagi pemerintah adalah perencanaan dan manajemen lalu lintas serta pengendalian arus kendaraan umum untuk menghindari kemacetan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah.
- c) Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, fungsi utama dari terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

B. Pelaksanaan Peraturan Gubernur No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu

Penetapan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah mengacu pada Peraturan Gubernur No 06 tahun 2016 tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi dengan bus umum kelas ekonomi

di provinsi Lampung yaitu penetapan didasarkan pada jarak tempuh yaitu perkilometer (KM). Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah Provinsi Lampung, Dengan Dinas Perhubungan Lampung, PT Jasa Raharja, DPD Organda Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan YLKI Lampung.

Pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) peraturan Gubernur No 06 Tahun 2016 disebutkan bahwa Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) bus umum kelas ekonomi ditetapkan berdasarkan tarif dasar yang berlaku yaitu besarnya tarif adalah sebesar Rp.171, (seratus tujuh puluh satu rupiah) perkilometer yang diberlakukan pada hari-hari biasa.

Tarif tersebut Sedangkan tarif batas atas yaitu Rp222, (dua ratus dua puluh dua rupiah) perkilometer yang diberlakukan pada hari-hari tertentu seperti hari libur, akhir pekan, dan hari libur nasional serta tarif angkutan lebaran. Besarnya biaya yang dibayarkan oleh setiap penumpang ditetapkan berdasarkan batasan antara tarif batas atas dan tarif batas bawah dan dihitung dengan cara pembulatan dari hasil pengalihan tarif dasar yang dimaksud dikalikan dengan jarak tempuh dan ditambah dengan iuran wajib asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.60, (*enam puluh rupiah*) untuk sekali keberangkatan. Tarif berlaku satu tahun berjalan, penyesuaian dan perubahan tarif di atur lebih lanjut dalam peraturan yang lain menyesuaikan kebutuhan, seperti perubahan harga bahan bakar minyak, tarif pada saat lebaran atau hari-hari libur nasional.

Pemerintah dalam menetapkan telah berdiskusi bersama dengan berbagai pihak, agar mencerminkan keadaan bagi semua pihak. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2008 Pasal 2,5,6,7 Direktur Perhubungan

Darat menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk angkutan antar kota antar provinsi kelas ekonomi di jalan dengan bus umum. Selanjutnya Direktur Jendral Perhubungan Darat atas usul gubernur, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang memadai. Dan peraturan ini diawasi langsung oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.

Yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi yaitu berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK), serta mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat sehingga tercipta transportasi yang efisien dan efektif.

Variabel-variabel yang dianggap penting dalam menghitung biaya operasional kendaraan adalah, upah pengemudi, biaya administrasi (meliputi biaya PKB,KIR, ijin usaha, ijin trayek, retribusi), biaya PKB (pajak kendaraan bermotor), biaya tak terduga dan keuntungan bagi pemilik kendaraan.

Setelah tarif ditetapkan pemerintah melakukan sosialisasi kepada semua pihak melalui media cetak koran, media elektronik radio televisi, internet dan media sosial, ditempel di baleho. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar para penyedia jasa angkutan umum dan konsumen mengetahui dan memahami tarif baru yang diberlakukan, agar adanya keseragaman serta keadilan bagi semua pihak atas tarif yang ditetapkan tersebut. Tarif batas atas dijadikan

acuan untuk melindungi konsumen sedangkan tarif batas bawah diberlakukan untuk melindungi penyedia jasa.

Penerapan tarif di lapangan yang ditetapkan oleh bus berbeda dengan ketentuan pemerintah dengan berbagai klasifikasi dan golongan yang berbeda-beda seperti golongan pelajar, mahasiswa, pegawai negeri sipil kemudian golongan umum, yaitu meliputi pekerja swasta atau orang yang hendak bepergian.

Seperti pelajar mahasiswa dan PNS ditetapkan kisaran tarif Rp.5000-Rp.15000, dengan penerapan yang berbeda-beda terkadang ada yang Rp.5000, atau Rp.10000, bahkan Rp15.000, mereka meminta tambah tarif dengan berbagai alasan kondisi seperti bus yang sepi penumpang, kondisi sudah terlalu sore dan tidak ada bus lain, tarif sudah naik atau bahkan jika tidak diberikan bisa dengan nada tinggi atau marah sehingga membuat penumpang takut maka, dengan berat hati ia menuruti permintaan kenek bus.¹⁰² Hal serupa banyak dialami oleh penumpang bus terutama penumpang kalangan pelajar/ mahasiswa. Hal lain pernah dialami mahasiswa lain pernah sampai meminta turun dari bus ketika bus sudah berjalan dari tempat pemberhentian, karena merasa tarif yang dibebankan padanya terlalu besar dan memberatkannya.

Bagi kalangan umum atau wiraswasta tarif yang dibebankan antara Rp.15000,-Rp.30000, hal ini banyak dikemukakan oleh responden. Penetapan tarif yang dibebankan oleh penyedia jasa dianggap wajar olehnya, karena penumpang umum jika membayar harga yang dibawah Rp.15000, itu tarif untuk pelajar, sedangkan tarif umum diatas tarif tersebut. Hal lainnya yaitu

¹⁰² Rivan zainuri (penumpang bus ekonomi) *Wawancara* dengan penulis, di Jalan Pramuka, Rajabasa Bandar Lampung, 28 september 2017.

ketidaktahuan penumpang akan tarif yang seharusnya dikarenakan tidak adanya informasi seperti stiker, atau berupa tulisan tarif. Sehingga mau tidak mau harus membayar dengan harga tersebut walaupun dengan keberatan.

Hal lainnya yaitu tarif yang dibebankan dengan sistem jauh dekat sama, yaitu dengan tidak menggunakan jarak tempuh. Dimana setiap penumpang dibebankan dengan tarif yang sama walaupun dengan jarak yang berbeda. Penyedia jasa beralasan bahwa ketetapan ini berasal dari pemerintah.¹⁰³

¹⁰³Bambang (Kondektur bus ekonomi) *Wawancara* dengan penulis, di Jalan Pramuka, Rajabasa Bandar Lampung, 28 september 2017

BAB IV
Pelaksanaan Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur
No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek
Bandar Lampung-Pringsewu

A. Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Trayek Bandar Lampung-Pringsewu

Jasa transportasi kini menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat, guna mempercepat mobilisasi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini mengakibatkan mereka perlu saling bergerak dan saling berhubungan dalam hal ini transportasi menjadi bagian yg integral/tidak terpisahkan dari suatu fungsi masyarakat yang menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan jangkauan dan lokasi dari kegiatan yang produktif.

Tarif (ongkos) menjadi hal yang penting mempengaruhi seberapa besar minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi bus ekonomi, sebab itu lah pemerintah menetapkan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan peraturan tarif batas atas dan batas bawah. Penetapan oleh pemerintah dalam pandangan hukum islam disebut *al tas'ir al jabari*.

Untuk menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut transportasi harus terjangkau serta berkeadilan bagi semua masyarakat. Bus ekonomi erat kaitannya dengan manfaat pemindahan orang dari suatu tempat ketempat lain. Dalam hal ini disebut dengan jual beli jasa, yang dalam pandangan Islam disebut dengan *ijarah*.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti tarif ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi biaya oprasional kendaraan (BOK), serta mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan dalam provinsi dengan bus ekonomi. Pemerintah dirasa cukup adil dalam menetapkan tarif karena telah mempertimbangkan berbagai aspek serta mengakomodir kepentingan semua pihak.

Pada praktik pelaksanaan di lapangan harga tarif ditetapkan berbeda-beda dengan klasifikasi pelajar/mahasiswa, guru, PNS, serta masyarakat umum, dengan tarif yang berbeda-beda. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tarif yang ditetapkan dirasa terlalu membebani oleh masyarakat, dengan penambahan tarif mulai dari Rp.5000, - Rp.30000, dari tarif normal, dianggap merugikan pengguna jasa transportasi tersebut. Kenaikan tarif paling besar ditetapkan kepada penumpang umum yang jarang atau bahkan tidak pernah naik bus, mulai dari Rp.10000, – Rp.25000, karena mereka tidak memiliki informasi yang utuh terkait tarif yang berlaku. Sedangkan kalangan pada pelajar kenaikan hanya pada kisaran Rp.5000, - Rp.10000.

Karena tidak adanya kerelaan dari konsumen dengan tarif tersebut dan selalu terkesan ada unsur pemaksaan. Intimidasi juga sering dirasakan oleh penumpang bus, berupa pemaksaan, kata-kata keras dengan raut wajah marah, sehingga membuat penumpang merasa tidak nyaman.

Masyarakat menilai kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan didalam bus berupa tempelan tarif didalam bus, terhadap tarif yang sebenarnya menjadi celah bagi pemilik jasa kendaraan untuk menaikkan tarif yang cukup besar. Selain itu

pengawasan pemerintah juga dirasa sangat kurang dalam proses mengawasi pemberlakuan tarif tersebut.

Namun pemilik jasa kendaraan berpendapat tarif ini merupakan tarif yang sesuai dan umum, dirasa demikian karena semakin menurunnya jumlah penumpang yang berpergian menggunakan bus, sehingga menurunkan jumlah pendapatan mereka. Hal ini berimbas pada setoran yang menurun kepada pemilik kendaraan. Pemilik jasa juga berpendapat biaya perawatan mobil berupa suku cadang mobil yang harganya sudah semakin tahun semakin naik, sehingga mereka menaikkan tarif tersebut.

Hal lainnya juga sebagian besar pemilik jasa/kondektur bus tidak mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan umum bus ekonomi. Mereka menilai pemerintah kurang dalam mensosialisasikannya.

Sehingga pemilik jasa/kondektur menaikkan tarif dengan sekenanya, jika penumpang tidak komplain maka mereka menetapkan tarif dengan tinggi, namun jika penumpang komplen maka tarif bisa diturunkan sesuai dengan nego di bis. Yang menjadi standar yaitu apakah penumpang sering naik bus/langganan atau hanya sesekali naik untuk suatu urusan. Seperti pelajar, mahasiswa, PNS, wiraswata mereka sudah terbiasa naik bus ekonomi maka tarifnya agak murah, namun jika terlihat tidak sering maka tarifnya cukup tinggi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung-Pringsewu

Metode dalam menggali hukum Islam pada penulisan skripsi ini menitikberatkan pada prinsip *Al Maqasid Al-Shariah* yaitu melihat sejauh mana akad dan transaksi yang dilaksanakan telah mencerminkan tujuan syariah yaitu suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang berazaskan menarik manfaat dan menjauhkan dari kemafsadatan.

Pelaksanaan penetapan harga dalam pandangan hukum Islam disebut dengan *al- tas'ir al jabari*, yaitu pemerintah menetapkan harga suatu komoditas tertentu, serta memberakukannya dalam transaksi warganya. Ulama berbeda pendapat tentang penetapan harga tersebut oleh pemerintah. Sebagian ulama melarang seperti Ibnu Qudamah, Sayyid Sabiq, Imam An Nabani, Serta Sebagian Ulama Madzhab Syafi'i, Hanbali Dan Maliki, dengan dalil Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁴

Menurut sebagian ulama *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis sebab *ta'sir* bermakna pemaksaan atas

¹⁰⁴Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 20015), h.83

penjual dan pembeli untuk berjual beli. Ini melanggar kepemilikan atas harta miliknya karena ia berhak menjual barang dengan harga yang ia sukai.

Sebagian ulama pun membolehkan *tas'ir* bahkan wajib menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang mencukupi. Alasan yang dikemukakan bahwa pemerintah di dalam Syariat Islam diberikan kewenangan untuk kemaslahatan serta keadilan bersama. Terlebih lagi kenaikan harga diakibatkan oleh manusia bukan murni mekanisme penawaran dan permintaan yang dianggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.

Intervensi harga oleh pemerintah baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam atau terjadinya kesewenang-wenangan yang terjadi dalam penentuan harga pasar yang menimbulkan kemadhorotan bagi masyarakat.

Dalam penetapan harga tarif angkutan umum yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Pengaturan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan Mobil Bus Kelas Ekonomi di Provinsi Lampung, hal ini telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditepakan oleh ulama yang membolehkan pemberlakuan *Al Tas'ir al Jabari*.

Penetapan tarif dilakukan untuk melindungi seluruh kepentingan pihak baik masyarakat, dalam hal ini konsumen, pemilik jasa, agar tercipta keadilan bersama. Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif angkutan bus ekonomi oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang dalam hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan penyedia jasa agar harga

yang di tawarkan konsumen tidak terlalu rendah sehingga berakibat rugi bagi pemilik bus/penyedia jasa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Yahya bin Umar yang menyatakan pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab kesejahteraan umum. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi berpendapat jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi masyarakat, di mana hak masyarakat harus dilindungi dari kerugian akibat ketidak seimbangan harga, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan.

Melihat praktik jasa tranpostasi dalam hal ini bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung- Pringsewu, sangat berkaitan dengan jasa *ijarah*, yang mana jasa (*ijarah*) di perbolehkan praktik jasa tersebut sebagaimana al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Qs. Al-Baqarah: 233)¹⁰⁵

Ayat di atas tentang kebolehan mengambil upah atas manfaat namun pada realita di lapangan, pelaksanaan tarif yang diberlakukan oleh pemilik jasa bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu tidak sesuai dengan yang

¹⁰⁵ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.37.

ketentuan akad *ijarah* yang berlaku, ada beberapa alasan mengapa akad *ijarah* ini tidak dibenarkan.

Pertama, tidak terpenuhinya rukun *ijarah* (jual beli jasa), jumhur ulama bersepakat diantara rukun *ijarah* yaitu adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad, namun pada praktik di lapangan banyak sekali ditemukan unsur pemaksaan dalam transaksi oleh kondektur bus ekonomi, terhadap penumpang bus dalam menetapkan tarif yang terkadang di pemaksaan dilakukan dengan nada tinggi, raut wajah marah, sehingga konsumen terpaksa membayar tarif/ongkos tersebut dengan terpaksa dan berat hati. Hal ini bertentangan dengan Nash Al- Qur'an Q.S An-Nisa ;29-30 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”¹⁰⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang wajib dalam bermuamalat dilakukan dengan kerelaan diantara kedua belah pihak *antaradim minkum*, dan melarang

¹⁰⁶ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.83.

transaksi yang dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Tindakan kesewenang-wenang dan pemaksaan dalam transaksi sangat dilarang dalam syariat Islam. Melihat penetapan tarif yang dibebankan terhadap penumpang bus hanya menguntungkan satu pihak yaitu pemilik bus dan mendzalimi pihak lain.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa kerelaan menjadi syarat jual beli. Jika tidak ada kerelaan kedua belah pihak maka jual beli tidak sah. Meskipun pendapat ini berbeda dengan jumhur, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan para pengikutnya.

Kedua, adanya ketidak jujuran oleh kondektur bus terhadap tarif yang ditetapkan terhadap penumpang bus. Normalnya tarif dengan satu jarak tempuh, jam, dan bus yang sama tarif ditetapkan sama. Namun tarif ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan keinginan kondektur bus. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat upah dalam transaksi *ijarah* yaitu, upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertansaksi sejak awal, dalam artian tidak boleh ada kebohongan atau *tadlis*. Hal ini disebabkan ketidaktahuan salah satu pihak yang mengetahui informasi, terhadap harga yang ditetapkan dah harus sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Kemudian melihat kaidah fiqih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”¹⁰⁷

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Termasuk

¹⁰⁷ Nashr Farid Muhamad Wasil, Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, Cetakan Keempat, 2015), H.17.

dalam transaksi jual beli jasa, transaksi yang kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam melakukan jual beli, sehingga ia rentan menjadi korban penipuan dan terdzalimi.¹⁰⁸

Ketiga, tarif yang ditetapkan kepada penumpang bus tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Lampung No 06 hal ini tidak dibenarkan merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang ketaatan rakyat terhadap pemimpin dikalangan orang mukmin adalah kewajiban, salah satunya mematuhi perundang-undangan yang berlaku disuatu daerah. Selagi peraturan tersebut tidak untuk bermaksiat pada Allah.¹¹⁰ Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi administrasi angkutan penumpang dengan mobil bus umum AKDP yaitu BAB I ketentuan umum pasal 1:

¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 87.

¹¹⁰ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)*, Terjemah Arif Rahman Hakim, Et. Al., (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2016),h. 484.

“ Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan penumpang dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa/penumpang dengan menaikan tarif melebihi ketentuan tarif yang berlaku”.¹¹¹

Dalam pasal ini jelas menaikan tarif di atas peraturan merupakan pelanggaran sekaligus ketidak taatan terhadap peraturan pemerintah/pemimpin.

Keempat, pemerintah menetapkan tarif angkutan umum untuk menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur penganiyaan dalam transaksi, termasuk dalam menentukan harga. Harga yang adil yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Meskipun begitu hal ini tidak diterapkan oleh pemilik bus yang mana penumpangnya yang dirugikan dan tidak ada pilihan lain jika mau menolak. Padahal Islam mengajarkan untuk bersikap adil kepada semua.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Hud ayat 85 :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

Artinya: "Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".¹¹²

Dalam tafsir Al Misbah bahwa dijelaskan perintah untuk berlaku adil. Pada ayat sebelumnya Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsirnya berlakulah adil terhadap Allah dengan mengesakan-Nya, di lanjutkan pada ayat ini, yaitu perintah

¹¹¹ Keputusan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Dalam Profinsi (AKDP) Oleh Perusahaan Angkutan Penumpang Diprofinsi Lampung, Pasal 1 Ayat (6).

¹¹² Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 231.

berlaku adil kepada manusia. Termasuk dalam transaksi muamalah agar menghindari tindak kecurangan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli jasa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Dalam hal ini pemilik jasa bus terkesan mengesampingkan hal ini, dengan tidak berbuat adil pada penumpangnya dengan menetapkan tarif diatas yang seharusnya.

Menurut penulis, pemilik jasa bus ekonomi yang dalam hal ini kondektur bus dalam menetapkan tarif seharusnya dengan sewajarnya saja, mengingat tarif ini penting untuk menarik minat masyarakat agar mau menaiki bus ekonomi. Jika penetapan tarif terus dilakukan dengan tidak mempertimbangkan peraturan serta kemampuan daya beli masyarakat maka bukan tidak mungkin masyarakat akan beralih pada moda transportasi lain. Peningkatan pelayanan serta kualitas mobil juga perlu diperhatikan agar tercipta keamanan dan kenyamanan penumpang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan analisis hukum Islam, maka dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penetapan harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Dan Luar Profinsi Dengan Bus Ekonomi yaitu tarif batas bawah Rp.7000 dan tarif atas Rp. 14000. Tetapi, realita yang terjadi di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No.06 Tahun 2016 tidak dilaksanakan dengan demikian tarif ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan *al tas'irul al jabari* oleh ulama.
2. Pandangan hukum Isam terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang penetapan tarif bus kelas ekonomi trayek Bandar Lampung- Pringsewu yang dilakukan oleh penyedia jasa bus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam bermuamalat, analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan *Al Maqasid Al-Shariah* diperoleh kesimpulan yaitu:

- a. Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum terhadap penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah/peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya kecurangan yang di lakukan oleh pihak penyedia jasa yaitu memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga masyarakat merasa terbebani.
- c. Adanya ketidak relaan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini penumpang dikarenakan unsur pemaksaan, sehingga menyebabkan pembeli tidak *ridha* dengan jasa yang ia bayarkan.
- d. Pada proses jual beli jasa yang sudah peneliti ungkapkan dalam bab II yaitu sewa-menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus terpenuhi yaitu meliputi orang yang berakad, *sighat*, *ujrah*/ manfaat serta adanya kerelaan dari semua pihak, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh *syariat*.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 06 belum sesuai dengan Hukum Islam yaitu penetapan tarif yang dilakukan oleh pemilik jasa belum sesuai dengan akad *ijarah*. Maka peneliti memiliki saran yaitu:

1. Untuk pemilik jasa angkutan umum, perlu adanya kesadaran bersama untuk menjalankan peraturan penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, agar tidak merugikan konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan seperti ramah terhadap penumpang, tidak ugal-ugalan, jam tunggu

yang tidak terlalu lama, agar semakin banyak masyarakat yang beralih ke moda transportasi umum, utamanya bus kelas ekonomi.

2. Bagi penumpang agar mencari tahu tarif sebenarnya, sebelum berkendara dan tidak dengan mudah menuruti tarif yang dibebankan. Melaporkan kepada petugas pengawas dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Darat agar ada tindakan tegas terhadap oknum bus.
3. Bagi Pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan masif agar semua pihak mengetahui tarif yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting pengawasan dilapangan secara menyeluruh dan berkala, tidak hanya pada momen tertentu saja. Agar tidak terjadi pelanggaran serta penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar.

